



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
Kementerian Keuangan  
**2025**



# Daftar Isi

<b>Bab 1. Pendahuluan</b>	2
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
C. Peran Strategis KPKNL Balikpapan	7
D. Sistematika Laporan	8
<b>Bab 2. Rencana Kinerja</b>	10
A. Perencanaan Strategis	12
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	17
<b>Bab 3. Akuntabilitas Kinerja</b>	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	36
C. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	37
<b>Bab 4. Penutup</b>	42
<b>Lampiran</b>	43
Perjanjian Kinerja Tahun 2026	45

## Daftar Tabel

### Bab 1

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	5

### Bab 2

Tabel 2.1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis DJKN Tahun 2025-2029	15
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2026	18

### Bab 3

Tabel 3.1 Ringkasan Target dan Pencapaian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi IKU 1a-CP	25
Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi IKU 1b-CP	26
Tabel 3.4 Perbandingan target dan realisasi IKU 1c-CP	26
Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi IKU 2a-CP	28
Tabel 3.6 Perbandingan target dan realisasi IKU 2b-CP	28
Tabel 3.7 Perbandingan target dan realisasi IKU 2c-CP	29
Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi IKU 3a-CP	30
Tabel 3.9 Perbandingan target dan realisasi IKU 4a-CP	30
Tabel 3.10 Perbandingan target dan realisasi IKU 4b-CP	31
Tabel 3.11 Perbandingan target dan realisasi IKU 5a-CP	32
Tabel 3.12 Perbandingan target dan realisasi IKU 5b-CP	32
Tabel 3.13 Perbandingan target dan realisasi IKU 5c-CP	33
Tabel 3.14 Perbandingan target dan realisasi IKU 6a-CP	33
Tabel 3.15 Perbandingan target dan realisasi IKU 6b-N	34
Tabel 3.16 Perbandingan target dan realisasi IKU 6c-N	34
Tabel 3.17 Perbandingan target dan realisasi IKU 7a-CP	35
Tabel 3.18 Perbandingan target dan realisasi IKU 7b-N	35
Tabel 3.19 Perbandingan target dan realisasi IKU 8a-N	36
Tabel 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	37

## Daftar Gambar

### Bab 1

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPKNL Balikpapan	7
---	---



Adi Suharna

Kepala KPKNL Balikpapan

# Sambutan Kepala KPKNL Balikpapan

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya KPKNL Balikpapan telah berhasil menuntaskan tahun anggaran 2025 dengan dedikasi dan integritas yang tinggi. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini disusun sebagai perwujudan akuntabilitas kami kepada publik dan pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang di wilayah kerja kami.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika. Sebagai Instansi Vertikal Kementerian Keuangan yang berkedudukan di gerbang utama Kalimantan Timur, KPKNL Balikpapan terus bertransformasi menjadi unit yang adaptif untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, termasuk memberikan dukungan optimal terhadap tata kelola aset negara yang strategis di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) rata-rata tingkat pencapaian sebesar 114,16. Dari capaian tersebut, secara keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan pada KPKNL Balikpapan dominan berwarna hijau dan melampaui target yang ditetapkan.

Tentu saja, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh punggawa KPKNL Balikpapan serta kolaborasi yang harmonis dengan para *stakeholder*. Meski demikian, kami menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan. Laporan ini juga memotret berbagai tantangan yang kami hadapi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performa di tahun-tahun mendatang.

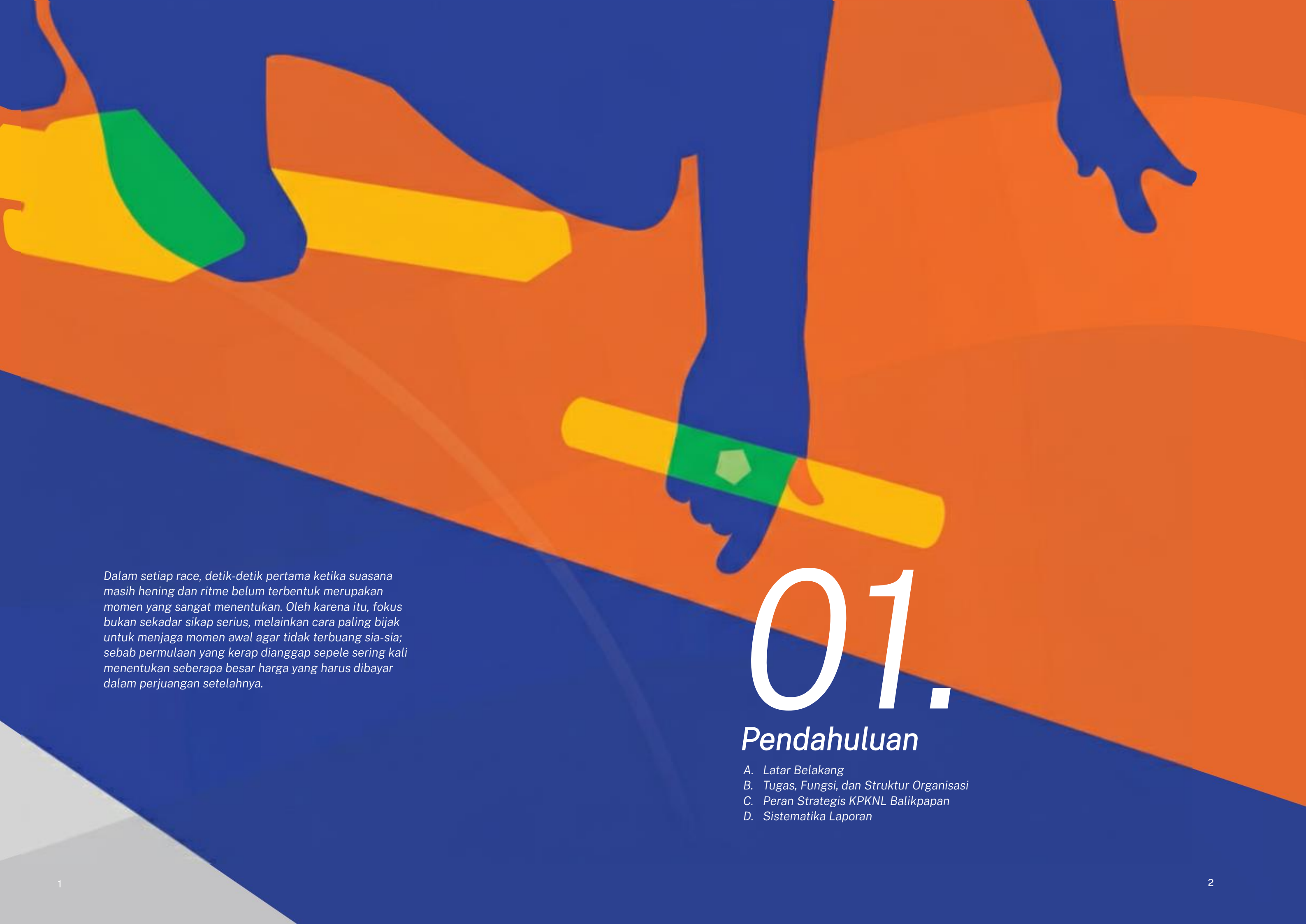
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan dan bermanfaat. Kami berkomitmen untuk terus bergerak maju, menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kerja kami di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Kabupaten Paser dan sekitarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala KPKNL Balikpapan,



Ditandatangani secara elektronik  
Adi Suharna



*Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.*

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis KPKNL Balikpapan
- D. Sistematika Laporan



## A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Dalam penyusunan LKj Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, selain penyajian ikhtisar capaian kinerja tahun 2025, juga menyajikan proses serta perencanaan kinerja yang menghasilkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 yang sekaligus menjadi lampiran dari dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025.

Secara formal, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Adapun tugas KPKNL Balikpapan adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun dukungan sumber daya manusia pada KPKNL Balikpapan tahun 2025 memiliki komposisi sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

*Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan*

Jumlah Pegawai	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Pelelang	Penilai	Pranata Keuangan APBN
32	1	5	17	5	3	1

**Tabel 1.2**

*Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

Jumlah Pegawai	S2	S1/D IV	D III	D I	SMA
32	6	16	4	2	4

**Tabel 1.3**

*Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin*

Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
32	22	10

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL Balikpapan terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas masing-masing sebagai berikut.

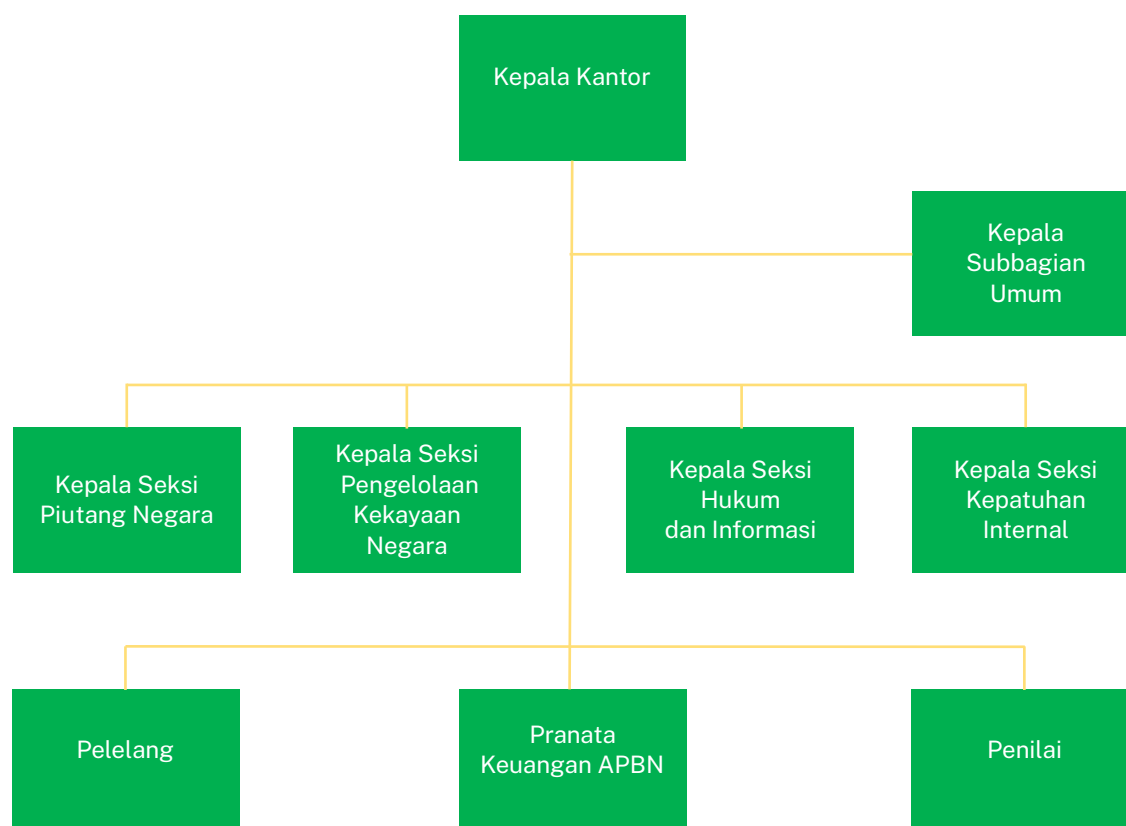
1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, persiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Terdapat tiga kelompok jabatan fungsional di KPKNL Balikpapan, yaitu Pelelang, Penilai, dan Pranata Keuangan APBN dengan masing-masing tugas sebagai berikut.
  - a. Pelelang mempunyai tugas melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang Nono Eksekusi Sukarela.
  - b. Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pranata Keuangan APBN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah bayar, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan persiapan analisis laporan keuangan instansi.

Struktur organisasi pada KPKNL Balikpapan dapat disajikan sebagai berikut.

**Gambar 1.1**

Struktur Organisasi KPKNL Balikpapan



## C. Peran Strategis KPKNL Balikpapan

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel yang salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan aset negara dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, serta mewujudkan pertanggungjawaban APBN yang efektif, efisien, dan optimal.

Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga utama dan pusat logistik penunjang pembangunan IKN. Selain itu kota Balikpapan juga berperan dalam menunjang aksesibilitas menuju IKN.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merupakan wilayah kerja KPKNL Balikpapan menuntut kinerja lebih yang sekaligus menjadi titik awal dalam proses pengawalan pembangunan IKN. Dengan demikian KPKNL Balikpapan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terutama dalam hal pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

## D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika yang terstruktur untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap Isi laporan, dengan susunan laporan sebagai berikut:

a. Bab 1 | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: A. Latar Belakang; B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; C. Peran Strategis KPKNL Balikpapan; dan D. Sistematika Laporan.

b. Bab 2 | Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar antara lain: A. Perencanaan Strategis; B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan C. Penyusunan Kinerja Tahun 2026.

c. Bab 3 | Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan antara lain: A. Capaian Kinerja Organisasi; B. Realisasi Anggaran; dan C. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja.

d. Bab 4 | Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

e. Lampiran

Pada bagian ini disajikan dokumen Perjanjian Kinerja KPKNL Balikpapan Tahun 2026.



*Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.*

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026



## A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DJKN memperhatikan beberapa hal. Aspek yang menjadi perhatian antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Selanjutnya, dampak perubahan iklim global juga meningkatkan kejadian bencana alam seperti gempa, banjir, dan longsor yang memberikan dampak negatif pada perekonomian dan memunculkan risiko kerusakan infrastruktur Barang Milik Negara (BMN), sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJKN.

Selain itu, penyusunan Renstra DJKN juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah merumuskan strategi-strategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai dengan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

### Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; dan
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

#### 2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- b. Berkerja dengan hati.

#### 3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

#### 4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

#### 5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

### **Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

### **Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.

## 4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

*Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis DJKN Tahun 2025-2029*

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal.	Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah atau memberikan manfaat ekonomi.	a. Identifikasi dan evaluasi BMN <i>underutilized</i> . b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL.
2	Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.	Penyelesaian layanan penilaian melebihi norma waktu.	a. Penerapan Daftar Tarif Pokok Sewa. b. Kaji ulang laporan penilaian. c. Penguatan pembinaan pada Kanwil dan KPKNL.	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan KPKNL.
3	Layanan lelang yang modern dan tepercaya.	Aplikasi Lelang mengalami gangguan yang dapat menghambat proses lelang.	a. Identifikasi dan evaluasi gangguan pada Aplikasi Lelang. b. Memperkuat keandalan sistem <i>database</i> .	Dit. Lelang dan Dit. TSI
4	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.	Penguatan integritas pelaksanaan tugas belum dapat mencegah perilaku <i>fraud</i> .	a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk semua pegawai terkait kode etik, potensi risiko pungli, dan tindak pidana korupsi. b. Pemetaan dan penyesuaian Risiko dengan Proses Bisnis yang dituangkan pada RCM. c. Pemantauan atas risiko pegawai oleh UKI.	Setditjen

		Pengelolaan Sumber Daya Organisasi belum optimal.	a. Peningkatan kualitas perencanaan penataan postur SDM dan kompetensi SDM. b. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi.	Setditjen
--	--	---	--	-----------

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan mengikat yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dengan pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran sesuai target yang telah ditetapkan, perjanjian kinerja KPKNL Balikpapan Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja nomor PK-01/WKN.13/2025. Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Balikpapan yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

**Tabel 2.2**

*Sasaran Strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp21,1 M)

2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp386,2 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1,3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

## C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Latar belakang penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sama dengan tahun sebelumnya, namun terdapat penyesuaian terhadap sasaran strategis merujuk pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029. Pada tahun 2026 perjanjian tertuang dalam Perjanjian Kinerja nomor PK-01/WKN.13/2026. Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) IKU yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel.
2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif.

**Tabel 2.3**

*Sasaran Strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp14 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp600 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp126,5 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80

8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83
		8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti	95,6%





Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Balikpapan tahun 2025 di antaranya tercermin pencapaian kinerja yang disepakati dalam perjanjian kerja. Pada tahun 2025 KPKNL Balikpapan menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut, ditetapkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas pencapaian pada setiap sasaran strategis. Pada tahun 2025 hasil rata-rata tingkat pencapaian dari keseluruhan sasaran strategis adalah 114,47 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1**

*Ringkasan Target dan Pencapaian Kinerja Tahun 2025*

Unit Organisasi : KPKNL Balikpapan  
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Kode Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	100%	120%	120	120
		1b-CP	100	105,32	105,32	105,32
		1c-CP	100% (Rp21,1 M)	176,22%	176,22	120
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	100%	118,89%	118,89	118,89
		2b-CP	100% (Rp386,2 M)	67,89%	67,89	67,89
		2c-CP	100% (1,3 M)	123,42%	123,42	120
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	74	99,80	134,86	120

4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	100%	101,56%	101,56	101,56
		4b-CP	100%	110%	110	110
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	100%	145,33%	145,33	120
		5b-CP	70%	108,03%	154,32	120
		5c-CP	80%	116,54%	145,68	120
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	100	120	120	120
		6b-N	100	125,22	125,22	120
		6c-N	80%	98	122,50	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	100	114,77	114,77	114,77
		7b-N	80	111,25	139,06	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	80	94,83	118,54	118,54

Progres perbandingan antara target dan realisasi serta penjelasan terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.2**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 1a-CP*

1. Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan (1a-CP)

K-Three	1 – Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP – Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Capaian IKU ini merupakan tanggung renteng KPKNL Balikpapan dengan kantor pusat DJKN, sehingga pencapaian IKU bergantung pada tindak lanjut hasil rekomendasi dari seluruh unit yang terlibat.

Terhadap hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) tahun 2024 terdapat 13 (tiga belas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Bahwa 10 (sepuluh) rekomendasi di antaranya merupakan tanggung jawab KPKNL Balikpapan dan telah dilaksanakan seluruhnya, antara lain pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 dan melakukan pemantauan atas hasil survei melalui e-SKPL kepada pengguna layanan.

**Tabel 3.3***Perbandingan target dan realisasi IKU 1b-CP*

## 2. Indeks Integritas (1b-CP)

K-Three	1 – Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP – Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	120	120	105,32	105,32	
Capaian	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	105,32	105,32	

Terhadap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) rekomendasi yang harus diselesaikan pada tahun 2025 dan seluruh rekomendasi yang ditetapkan telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Balikpapan. Dalam rangka memaksimalkan jumlah responden, kami melakukan komunikasi dan publikasi secara masif kepada para pihak eksternal yang terlibat.

**Tabel 3.4***Perbandingan target dan realisasi IKU 1c-CP*

## 3. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1c-CP)

K-Three	1 – Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1c-CP – Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp21,1 M)	Max/ TLK
Realisasi	121,39%	77,55%	77,55%	72,12 %	72,12%	176,22 %	176,22%	
Capaian	120	77,55	77,55	72,12	72,12	176,22	176,22	
Nilai Kinerja	120	77,55	77,55	72,12	72,12	120	120	

Komponen dalam indikator kinerja ini di antaranya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Aset, PNBP Lelang, dan PNBP Piutang Negara yang akan dijelaskan sebagai berikut.

## a. PNBP Aset

Sumber utama PNBP aset diperoleh dari tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN di antaranya persetujuan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan persetujuan pemindahtanganan dengan cara penjualan lelang.

Terdapat kondisi di mana surat persetujuan tidak ditindaklanjuti atau dibatalkan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kondisi di antaranya penjualan lelang yang tidak laku maupun satuan kerja keberatan dengan hasil penilaian terhadap nilai wajar objek sewa. Dengan demikian siklus pengelolaan BMN itu sendiri menjadi terhambat, terlebih bagi satuan kerja dengan birokrasi pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN dengan jenjang yang panjang.

Menyikapi hal tersebut, KPKNL Balikpapan melakukan monitoring secara rutin kepada satuan kerja terhadap surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan. Selain itu, penggalan potensi PNBP dilakukan secara aktif baik melalui basis data administratif maupun langsung di lapangan. Hal tersebut sekaligus menjadi sarana

melakukan pembinaan kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan *awareness* akan pentingnya optimalisasi aset dalam meningkatkan PNBP.

b. PNBP Lelang

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini antara lain tingginya frekuensi pembatalan lelang oleh Penjual, kesalahan teknis dalam pengumuman lelang, dan SKPT yang tidak dapat diterbitkan. Selain itu, terdapat objek lelang yang dianggap kurang *marketable* sehingga objek lelang tidak laku atau Tidak Ada Penawaran (TAP).

Upaya dalam menghadapi tantangan tersebut, KPKNL Balikpapan telah melakukan berbagai macam strategi seperti peningkatan edukasi dan komunikasi kepada para pengguna jasa untuk menghindari adanya permasalahan teknis dalam setiap tahapan pelaksanaan lelang, serta melakukan penggalan potensi lelang untuk memaksimalkan PNBP.

c. PNBP Piutang Negara

Kondisi perekonomian dan politik nasional yang penuh ketidakpastian menjadi salah satu isu bagi PNBP dari Piutang Negara. Debitur yang secara rutin berkontribusi menyumbang Biad dan *Outstanding* terbesar pada KPKNL Balikpapan tidak lagi dapat melanjutkan pembayaran atas kewajibannya.

Menyikapi hal tersebut, KPKNL Balikpapan telah berupaya lebih dalam melakukan penagihan secara intensif kepada para Debitur terutama kepada Debitur dengan potensi yang besar. Mediasi antara Debitur Instansi dengan Penyerah Piutang juga senantiasa kami lakukan.

**Tabel 3.5***Perbandingan target dan realisasi IKU 2a-CP*

## 4. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara (2a-CP)

K- Three	2 – Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP – Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	151,85%	141,76 %	141,76 %	118,96 %	118,96%	118,89 %	118,89 %	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Hasil pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) terhadap BMN yang memiliki persentase tingkat kesesuaian di bawah 50% menjadi target optimalisasi. Pencatatan klasifikasi BMN pada satuan kerja merupakan hal penting untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat.

Beberapa hal yang menyebabkan objek pengukuran tidak begitu signifikan untuk dilakukan optimalisasi antara lain *layout* bangunan itu sendiri, maupun keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada satuan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian data administrasi dan fisik di lapangan, dapat dipahami bahwa tidak semua objek pengukuran memiliki kondisi yang sama untuk dilakukan optimalisasi melalui penggunaan dan/atau pemanfaatan. Namun demikian, telah dilakukan komunikasi berkelanjutan dengan satuan kerja untuk mendorong terwujudnya optimalisasi pengelolaan BMN utamanya melalui penggunaan dan/atau pemanfaatan dan bersama-sama mencari alternatif cara optimalisasi lain yang memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 3.6***Perbandingan target dan realisasi IKU 2b-CP*

## 5. Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

K- Three	2 – Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP – Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp386,2 M)	Max/ TLK
Realisasi	234,56%	93,75%	93,75%	79%	79%	67,89%	67,89%	
Capaian	120	93,75	93,75	79	79	67,89	67,89	
Nilai Kinerja	120	93,75	93,75	79	79	67,89	67,89	

Capaian atas indikator kinerja ini terdiri dari komponen realisasi Pelelang Kelas I pada KPKNL Balikpapan dan realisasi lelang pada Pegadaian. Secara umum, realisasi dari kedua komponen tersebut masih terdapat ruang untuk dioptimalkan. Beberapa objek lelang dianggap kurang diminati pasar, dan terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa pembelian barang melalui lelang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

KPKNL Balikpapan yakin selalu ada ruang untuk perbaikan. Menyoroti kondisi yang ada, hal yang telah diupayakan adalah melakukan penggalian potensi lelang lebih intensif dan berusaha untuk lebih jeli dalam melihat potensi di masa mendatang. Sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat juga senantiasa kami lakukan untuk memberikan keyakinan positif terhadap lelang.

**Tabel 3.7**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 2c-CP*

#### 6. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara (2c-CP)

K- Three	2 – Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP – Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,3 M)	Max / TLK
Realisasi	31,01%	175,26 %	175,26%	116,43 %	116,43 %	123,42 %	123,42 %	
Capaian	31,01	120	120	116,43	116,43	123,42	123,42	
Nilai Kinerja	31,01	120	120	116,43	116,43	120	120	

Kondisi perekonomian dan politik nasional yang penuh ketidakpastian begitu mempengaruhi realisasi indikator kinerja ini. Salah satu Debitur dengan kontribusi paling

besar terhadap penurunan nilai saldo piutang negara mengalami dampak atas ketidakpastian tersebut, sehingga penyelesaian kewajibannya saat ini terhambat.

Menyikapi hal tersebut, peningkatan intensitas penagihan dengan cara melakukan pemanggilan terutama kepada Debitur potensial telah dilakukan. Selain itu, pemetaan potensi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dalam mengoptimalkan upaya realisasi pada indikator kinerja ini juga dilakukan.

**Tabel 3.8***Perbandingan target dan realisasi IKU 3a-CP*

## 7. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3a-CP)

K-Three	3 – Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP – Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Avg
Realisasi	110	99,17	99,17	101,58	101,58	94,47	99,80	
Capaian	148,65	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Capaian pada indikator kinerja ini terdiri dari komponen edukasi dan komunikasi (edukom) lelang dan edukom piutang negara. Perubahan peraturan yang masif seiring dengan perkembangan kondisi yang dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi kami maupun para pengguna jasa.

Dengan demikian, setiap terjadi perubahan peraturan terkait lelang dan piutang negara maka segera dijadwalkan dan dilaksanakan sosialisasi kepada para pengguna jasa pada kesempatan pertama. Hal ini dilakukan selain dalam rangka memenuhi target kinerja juga untuk menghindari adanya miskomunikasi antara KPKNL Balikpapan dengan pengguna jasa yang dapat menghambat jalannya proses bisnis.

**Tabel 3.9***Perbandingan target dan realisasi IKU 4a-CP*

## 8. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan (4a-CP)

K-Three	4 – Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP – Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	171,43%	40,63 %	40,63 %	60,94 %	60,94 %	101,56 %	101,56 %	
Capaian	120	120	120	101,56	101,56	101,56	101,56	
Nilai Kinerja	120	120	120	101,56	101,56	101,56	101,56	

Program pensertipikatan BMN berupa tanah kerap kali menjadi isu yang menarik sekaligus menantang. Kementerian Keuangan melalui DJKN terus berupaya melakukan pengamanan terhadap aset negara khususnya tanah dengan melakukan program kerja sama antarinstansi dalam mewujudkan BMN berupa tanah yang tertib secara administrasi, hukum, maupun fisik.

Keberhasilan indikator kinerja ini merupakan buah dari sinergi yang terjalin baik antara Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan pihak lain yang terlibat. Penguatan terhadap pemutakhiran basis data tanah pada satuan kerja secara rutin kami lakukan monitoring sebagai dasar perencanaan tindakan selanjutnya. Kami secara bersama-sama dengan para pihak merumuskan strategi dalam melakukan pengamanan aset untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal.

**Tabel 3.10**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 4b-CP*

#### 9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (4b-CP)

K- Three	4 – Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP – Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	111,89%	111,40%	111,40%	100,04%	100,04%	110%	110%	
Capaian	120	120	120	120	120	110	110	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	110	110	

Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN merupakan proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan monitoring kinerja aset negara dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi penggunaan.

Evaluasi ini dilakukan terhadap 6 (enam) indikator utama yang terdiri dari kepentingan umum, manfaat sosial, tingkat kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa depan, kelayakan finansial, dan kondisi teknis objek yang dievaluasi.

Dalam pelaksanaannya, KPKNL Balikpapan secara teliti melakukan idektifikasi target indikatif, melakukan analisis, hingga pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi hasil perhitungan sehingga mendapatkan hasil optimal. Lebih jauh, tujuan dan manfaat pelaksanaan ini adalah untuk memberikan data BMN yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan, efisiensi anggaran terkait penggunaan tanah dan/atau bangunan, dan tentunya mengoptimalkan penggunaan BMN.

**Tabel 3.11***Perbandingan target dan realisasi IKU 5a-CP*

## 10. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara (5a-CP)

K- Three	5 – Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP – Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	113,33%	128,75 %	128,75 %	113,33 %	113,33 %	145,33 %	145,33 %	
Capaian	113,33	120	120	113,33	113,33	120	120	
Nilai Kinerja	113,33	120	120	113,33	113,33	120	120	

Penurunan jumlah Debitur yang memiliki kemampuan melakukan pelunasan, dan belum lengkapnya dokumen persyaratan PSBDT menjadi tantangan utama dalam pencapaian pada indikator kinerja ini.

Menyikapi hal tersebut, telah dilakukan strategi penagihan kepada Debitur potensial yang telah dipetakan sebelumnya dan melakukan pemetaan terhadap berkas potensial dalam pemenuhan syarat PSBDT. Selain itu, telah dilakukan pula penagihan secara lebih luas yakni yang ditujukan kepada para pihak terkait sebagaimana tertuang dalam Akta Perusahaan yang tercatat di Ditjen AHU.

**Tabel 3.12***Perbandingan target dan realisasi IKU 5b-CP*

## 11. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian (5b-CP)

K- Three	5 – Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP – Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max / TLK
Realisasi	111,16%	112,83 %	112,83 %	110,87 %	110,87 %	110,03 %	110,03 %	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perkembangan dalam proses digitalisasi layanan memiliki tantangan tersendiri. Pemohon pihak eksternal Kemenkeu merasa bahwa diperlukan penyederhanaan proses penginputan terutama dalam hal jumlah objek yang akan dinilai cukup banyak.

Di samping tetap memberikan pelayanan penilaian secara profesional, KPKNL Balikpapan senantiasa melakukan edukasi kepada para pengguna jasa khususnya pihak eksternal Kemenkeu mengenai manual aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP). Selain itu, upaya mendorong Kejaksaan Negeri untuk mengoptimalkan peran Penilai pada Kejaksaan dalam melakukan penilaian BMN yang termasuk dalam kewenangannya juga telah dilakukan.

**Tabel 3.13**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 5c-CP*

#### 12. Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

K-Three	5 – Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP – Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	57,88%	74,16%	74,16%	93,38%	93,38%	116,54%	116,54%	
Capaian	192,93	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Beberapa objek lelang dianggap kurang diminati pasar dan terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa pembelian barang melalui lelang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menyoroti kondisi yang ada, telah dilakukan penggalan potensi lelang yang lebih intensif dan lebih jeli dalam melihat potensi yang ada. Sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat juga senantiasa dilakukan untuk memberikan keyakinan positif terhadap lelang.

**Tabel 3.14**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 6a-CP*

#### 13. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (6a-CP)

K-Three	6 – Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP – Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Indikator kinerja ini memberikan gambaran kualitas kinerja anggaran yang diberikan kepada KPKNL Balikpapan dalam pelaksanaan tugas. Pada tahun berjalan, terdapat

efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 namun, target *output* tetap.

Menyikapi hal tersebut, pelaksanaan penggunaan anggaran dengan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dipilih sebagai strategi sehingga target *output* yang direncanakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dapat tercapai meskipun terdapat program efisiensi pada tahun berjalan.

**Tabel 3.15**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 6b-N*

14. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (6b-N)

K- Three	6 –Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N – Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	143,33	131,43	131,43	120	120	125,22	125,22	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa diperoleh berdasarkan dua unsur yaitu kualitas pengelolaan pengadaan yang diukur dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan ITKP pada aplikasi SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, dan e-Kontrak.

Pelaksanaan ITKP Barang dan Jasa pada KPKNL Balikpapan telah berpedoman pada pemenuhan TKDN dan komponen ITKP pada aplikasi tersebut sehingga dapat mencapai hasil optimal.

**Tabel 3.16**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 6c-N*

15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (6c-N)

K- Three	6 –Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N – Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	26,85%	51,73%	51,73%	86%	86%	98%	98%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Hasil pada indikator kinerja ini terdiri dari diukur berdasarkan dua komponen yaitu Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator, dan Pemenuhan Jam Pelajaran (JP) Pegawai.

Dari kedua komponen tersebut, salah satu komponen yaitu dalam hal pemenuhan JP pegawai perlu sikap proaktif baik dari unit pengelola kepegawaian maupun pegawai. Menyikapi kondisi tersebut, maka diambil langkah untuk tidak hanya bergantung pada pemanggilan pelatihan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, melainkan secara aktif melibatkan para pegawai dalam kegiatan yang menunjang maupun menciptakan kegiatan itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan realisasi pada indikator kinerja ini sehingga dapat memperoleh capaian optimal.

**Tabel 3.17**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 7a-CP*

#### 16. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum (7a-CP)

K- Three	7 – Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP – Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	116,21	115,30	115,30	115,58	115,58	114,77	114,77	
Capaian	116,21	115,30	115,30	115,58	115,58	114,77	114,77	
Nilai Kinerja	116,21	115,30	115,30	115,58	115,58	114,77	114,77	

Sepanjang tahun 2025 KPKNL Balikpapan kerap kali menerima gugatan yang sebagian besar berkaitan dengan objek yang dilelang melalui KPKNL Balikpapan. Hasil perhitungan dalam indikator kinerja ini didasarkan pada tahapan yang telah ditempuh KPKNL Balikpapan dalam menangani gugatan yang diterima.

Terhadap gugatan yang diterima, telah diupayakan respon dengan cepat dan tetap sehingga dalam penanganan permasalahan hukum ini dapat terselesaikan dan mencapai hasil optimal serta tidak menimbulkan potensi gugatan di masa mendatang.

**Tabel 3.18**

*Perbandingan target dan realisasi IKU 7b-N*

#### 17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (7b-N)

K- Three	7 – Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N – Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Avg
Realisasi	115	110	110	110	110	111,25	111,25	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Pada indikator kinerja ini, hasil diperhitungkan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan, ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik, dan ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website.

Seluruh komponen tersebut telah dipenuhi sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Setiap komponen memiliki fungsi penting dalam dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Tabel 3.19

*Perbandingan target dan realisasi IKU 8a-N*

#### 18. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8a-N)

K- Three	8 – Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko efektif							
	8a-N – Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	92,92	91,49	91,49	94,61	94,61	94,83	94,83	
Capaian	116,15	114,36	114,36	118,26	118,26	118,54	118,54	
Nilai Kinerja	116,15	114,36	114,36	118,26	118,26	118,54	118,54	

Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai memiliki 3 (tiga) komponen sumber data yaitu berdasarkan Pemeuhan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Unit, Pelaksanaan Penilaian Perilaku, dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Individu (DKI).

Terhadap ketiga komponen tersebut telah dilakukan sesuai perencanaan dan strategi yang ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa terdapat ruang penyempurnaan pada komponen Pelaksanaan DKI Tahun 2025 yang dilaksanakan setiap triwulan, akan dijadwalkan untuk dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2026 mendatang.

## B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP DIPA-015.09.2.537962/2025 tanggal 02 Desember 2024, pada awal tahun 2025 KPKNL Balikpapan menerima anggaran sebesar Rp6.542.719.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan jenis

belanja barang dan belanja modal. Selama periode tahun berjalan KPKNL Balikpapan telah mengalami sebelas kali revisi sehingga besaran anggaran dalam DIPA tahun 2025 menjadi sebesar Rp6.702.975.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Tabel 3.20**

*Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025*

Kode dan Nama Kegiatan/ <i>Output</i>		Pagu Dalam Rupiah (Rp)	Realisasi	
			Dalam Rupiah (Rp)	Persentase (%)
		6.414.033.000,00	6.342.509.990,00	98,88%
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	308.594.000,00	287.129.484,00	93,04%
CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	13.303.000,00	12.661.800,00	95,18%
CD.4798	Pengelolaan Aset	295.291.000,00	274.467.684,00	92,95%
WA	Program Dukungan Manajemen	6.105.439.000,00	6.055.380.506,00	99,18%
WA.4700	Legislasi dan Litigasi	50.000.000,00	44.653.593,00	89,31%
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6.021.687.000,00	5.978.814.728,00	99,29%
WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	24.296.000,00	22.809.921,00	93,88%
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	9.456.000,00	9.102.264,00	96,26%

## C. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, pada tahun 2025 dilakukan kegiatan audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap tata kelola pemenuhan rumah negara dan pengelolaan belanja modal dengan tujuan untuk memastikan:

1. Implementasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga telah sesuai dengan *grand design/roadmap* dan rumah negara yang ada telah dikelola dengan baik;
2. Proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana belanja modal dilaksanakan sesuai tata kelola yang baik; dan
3. Pengadaan barang/jasa telah menghasilkan barang/jasa yang tepat (kualitas, jumlah, waktu, dan biaya).

Pelaksanaan audit ini dilaksanakan dengan ruang lingkup.

1. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pemenuhan rumah negara KPKNL Balikpapan.
2. Pengelolaan rumah negara, meliputi penggunaan, penatausahaan pada SIMAN, penerbitan izin penghunian, pengamanan dan pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian rumah negara tahun 2024 dan 2025.
3. Persiapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa dengan sumber dana belanja modal TA 2024 dan 2025 (s.d. 30 September 2025) serta pencatatannya.

Berdasarkan hasil audit tersebut, dalam melaksanakan pengelolaan pemenuhan rumah negara dan pengelolaan belanja modal telah menunjukkan sejumlah kinerja positif, antara lain:

1. KPKNL Balikpapan telah menyelesaikan pembangunan, renovasi, dan pembelian atas 10 (sepuluh) rumah negara dengan *output* dan waktu penyelesaian sesuai kontrak.
2. KPKNL Balikpapan telah melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2024 dan 2025 secara tepat waktu.

Selain itu, berkaitan dengan evaluasi sistem pengendalian internal terdapat beberapa rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kepada KPKNL Balikpapan yang bersifat internalisasi dan perbaikan minor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.



# 04.

## Penutup

*Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.*



  
KEMENKEU

# Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen atas akuntabilitas kerja KPKNL Balikpapan sebagai instansi vertikal DJKN dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Sasaran strategis yang disusun telah mempertimbangkan rencana strategis Kementerian Keuangan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Di tengah ketidakpastian global dan kondisi politik dalam negeri, KPKNL Balikpapan terus berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian hasil yang baik di tahun ini adalah wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Balikpapan serta dukungan dari para pihak yang terlibat. Pencapaian ini juga merupakan sebuah kebanggaan sekaligus menjadi titik awal bagi KPKNL Balikpapan untuk menghadapi tantangan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan bagi seluruh pihak atas upaya KPKNL Balikpapan dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga tentu menjadi salah satu alat evaluasi dan dasar perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa mendatang.

# Lampiran



# Perjanjian Kinerja Tahun 2026



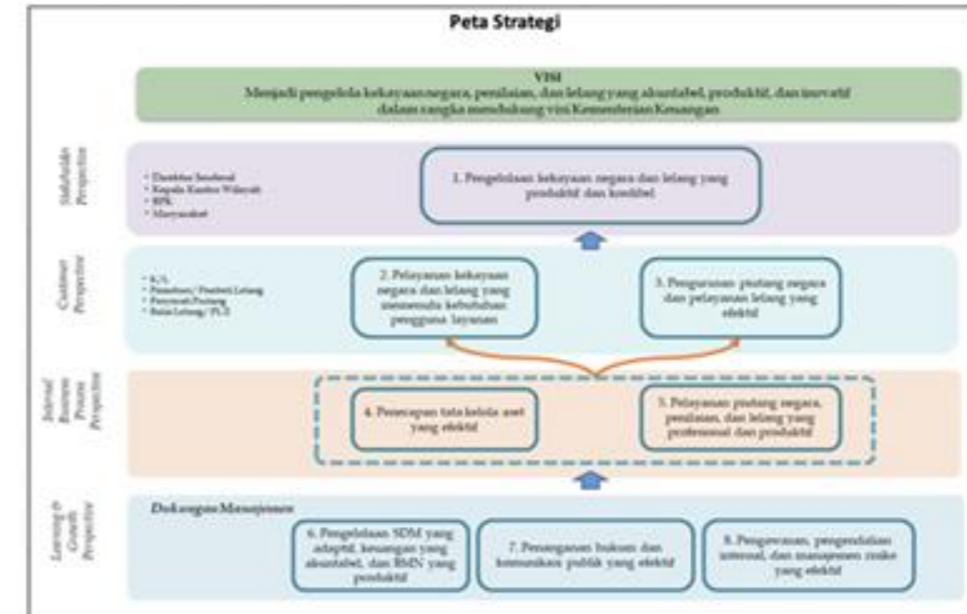
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-01/WKN.13/2026**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BALIKPAPAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPKNL Balikpapan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BALIKPAPAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp14,0 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp600 jt)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp126,5 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83
		8c-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	95,6%

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

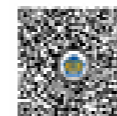
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp512,670,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp33,419,000
2. Pengelolaan Aset	Rp479,251,000
Program:	
Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp1,654,741,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp50,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,553,005,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp37,144,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp14,592,000

BALIKPAPAN KOTA, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Suharna

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



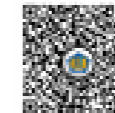
**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BALIKPAPAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14,0 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp600 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp126,5 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	83%	87%	87%	92%	92%	95,6%	95,6%

BALIKPAPAN KOTA, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan

Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Subarna

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan			

BALIKPAPAN KOTA, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Suharna



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026		
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Adi Suharna	NAMA	Jose Arif Lukito	
NIP	19720716 199403 1 003	NIP	19710912 199603 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp14,0 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp600 Jt)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp126,5 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	95.6%	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



BALIKPAPAN KOTA, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Adi Suharna  
19720716 199403 1 003

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito  
19710912 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026						
DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	32 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14,0 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp600 jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp126,5 M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	83%	87%	87%	92%	92%	95.6%	95.6%
<b>KONSEKUENSI</b>								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BALIKPAPAN KOTA, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Adi Suharna  
19720716 199403 1 003

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito  
19710912 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026







KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA